



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu menyesuaikan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.undang...

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun...

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan...

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1560);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor...

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

dan

**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.320.190.381.845,00 berkurang sejumlah Rp.209.488.925.225,00 sehingga menjadi Rp.1.110.701.456.620,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1 Semula	Rp. 1.320.190.381.845,00	
2 Bertambah/berkurang	Rp. (209.488.925.225,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.110.701.456.620,00

b. Belanja Daerah

1 Semula	Rp. 1.363.195.241.034,00	
2 Bertambah/berkurang	Rp. (48.323.580.279,53)	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 1.314.871.660.754,47
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (204.170.204.134,47)

c. Pembiayaan...

c. Pembiayaan Daerah :

1 Penerimaan			
a) Semula	Rp.	45.004.859.189,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp.	161.165.344.945,47	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		206.170.204.134,47
2 Pengeluaran			
a) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.		204.170.204.134,47
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0

Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp.	303.035.228.417,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(133.817.929.104,00)	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp.		169.217.299.313,00

b Dana Perimbangan :

1 Semula	Rp.	843.660.491.312,00	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	(55.564.893.005,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.		788.095.598.307,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1 Semula	Rp.	173.494.662.116,00	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	(20.106.103.116,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan	Rp.		153.388.559.000,00

(2) Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :

1 Pajak Daerah

a) Semula	Rp.	251.468.008.898,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp.	(133.020.748.375,00)	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.		118.447.260.523,00

2 Retribusi Daerah

a) Semula	Rp.	11.050.800.000,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp.	(1.873.800.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		9.177.000.000,00

3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan

a) Semula	Rp.	10.477.231.219,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp.	(1.517.351.737,00)	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		8.959.879.482,00

4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a) Semula	Rp.	30.039.188.300,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp.	2.593.971.008,00	

jumlah...



	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 32.633.159.308,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
	a Dana bagi hasil	
	1) Semula Rp. 123.997.470.312,00	
	2) Bertambah/berkurang Rp. 30.007.026.995,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 154.004.497.307,00
	b Dana Alokasi Umum	
	1) Semula Rp. 537.608.222.000,00	
	2) Bertambah/berkurang Rp. (49.917.969.000,00)	
	c. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 487.690.253.000,00
	Dana Alokasi Khusus	
	a) Semula Rp. 182.054.799.000,00	
	b) Bertambah/berkurang Rp. (35.653.951.000,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 146.400.848.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
	1 Hibah	
	a) Semula Rp. 21.599.600.000,00	
	b) Bertambah/berkurang Rp. 3.689.900.000,00	
	Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp. 25.289.500.000,00
	2 Dana Darurat	
	a) Semula Rp. 0,00	
	b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00	
	Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
	3 Dana bagi hasil Pajak	
	a) Semula Rp. 58.395.488.116,00	
	b) Bertambah/berkurang Rp. (18.395.488.116,00)	
	Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 40.000.000.000,00
	d Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	a) Semula Rp. 93.499.574.000,00	
	b) Bertambah/berkurang Rp. (5.900.515.000,00)	
	Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 87.599.059.000,00
	e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
	a) Semula Rp. 0,00	
	b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00	
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 0,00
	f. Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	
	a) Semula Rp. 0,00	
	b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00	

jumlah...

Jumlah Alokasi Dana Percepatan Pembangunan  
Infrastruktur Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 670.077.597.790,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. 52.570.407.248,47  
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 722.648.005.038,47

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 693.117.643.244,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. (100.893.987.528,00)  
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 592.223.655.716,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 506.367.719.356,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. (12.109.458.869,53)  
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 494.258.260.486,47

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00  
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00  
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 32.755.781.613,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. 6.575.341.454,00  
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 39.331.123.067,00

e. Belanja Bantuan sosial

1) Semula Rp. 10.002.194.000,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. (2.940.000.000,00)  
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 7.062.194.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00  
Jumlah Bagi Hasil Keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan keuangan

1) Semula Rp. 118.951.902.821,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. (9.212.483.100,00)  
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 109.739.419.721,00

h. belanja ....

- h. Belanja Tidak terduga
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 2.000.000.000,00  |                   |
| 2) Bertambah/berkurang                         | Rp. | 70.257.007.764,00 |                   |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. |                   | 72.257.007.764,00 |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 117.647.307.480,00 |                    |
| 2) Bertambah/berkurang                   | Rp. | 3.579.929.062,00   |                    |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | Rp. |                    | 121.227.236.542,00 |
- b. Belanja Barang dan jasa
- |  |     |                     |                    |
|--|-----|---------------------|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 314.428.227.622,00  |                    |
| 2) Bertambah/berkurang                           | Rp. | (34.545.772.665,45) |                    |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. |                     | 279.882.454.956,55 |
- c. Belanja Modal
- |  |     |                     |                    |
|--|-----|---------------------|--------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 261.042.108.142,00  |                    |
| 2) Bertambah/berkurang                 | Rp. | (69.928.143.924,55) |                    |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. |                     | 191.113.964.217,45 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan :
- |                                     |     |                    |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                           | Rp. | 45.004.859.189,00  |                    |
| 2) Bertambah/berkurang              | Rp. | 161.165.344.945,47 |                    |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. |                    | 206.170.204.134,47 |
- b. Pengeluaran :
- |                                      |     |                  |                  |
|--------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula                            | Rp. | 2.000.000.000,00 |                  |
| 2) Bertambah/berkurang               | Rp. | 00               |                  |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. |                  | 2.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
- |                                |     |                    |                    |
|--------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                      | Rp. | 45.004.859.189,00  |                    |
| 2) Bertambah/berkurang         | Rp. | 161.165.344.945,47 |                    |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | Rp. |                    | 206.170.204.134,47 |
- b. Pencairan Dana Cadangan :
- |  |     |      |      |
|--|-----|------|------|
| 1) Semula  | Rp. | 0,00 |      |
| 2) Bertambah/berkurang                           | Rp. | 0,00 |      |
| Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan | Rp. |      | 0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- |  |     |      |      |
|--|-----|------|------|
| 1) Semula  | Rp. | 0,00 |      |
| 2) Bertambah/berkurang   | Rp. | 0,00 |      |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. |      | 0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah :
- |   |     |      |      |
|---|-----|------|------|
| 1) Semula   | Rp. | 0,00 |      |
| 2) Bertambah/berkurang                              | Rp. | 0,00 |      |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. |      | 0,00 |
- e. Penerimaan...

e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp.	0,00
f	Penerimaan piutang daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan		Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a	Pembentukan Dana cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00
b	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	00	
	Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan		Rp.	2.000.000.000,00
c	Pembayaran pokok utang			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	0,00
d	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran ....

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

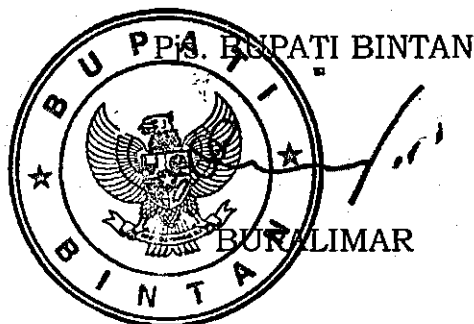
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

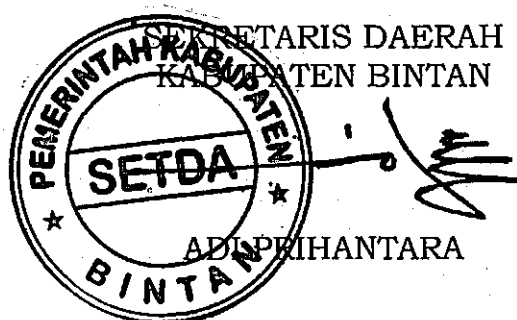
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 22 Oktober 2020



Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 22 Oktober 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 3,28/2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.320.190.381.845,00	1.110.701.456.620,00	(209.488.925.225,00)	(15,87)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	303.035.228.417,00	169.217.299.313,00	(133.817.929.104,00)	(44,16)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	251.468.008.898,00	118.447.260.523,00	(133.020.748.375,00)	(52,90)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.050.800.000,00	9.177.000.000,00	(1.873.800.000,00)	(16,96)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.477.231.219,00	8.959.879.482,00	(1.517.351.737,00)	(14,48)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.039.188.300,00	32.633.159.308,00	2.593.971.008,00	8,64
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	843.660.491.312,00	788.095.598.307,00	(55.564.893.005,00)	(6,59)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	123.997.470.312,00	154.004.497.307,00	30.007.026.995,00	24,20
1.2.2	Dana Alokasi Umum	537.608.222.000,00	487.690.253.000,00	(49.917.969.000,00)	(9,29)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	182.054.799.000,00	146.400.848.000,00	(35.653.951.000,00)	(19,58)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	173.494.662.116,00	153.388.559.000,00	(20.106.103.116,00)	(11,59)
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.599.600.000,00	25.289.500.000,00	3.689.900.000,00	17,08
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.395.488.116,00	40.000.000.000,00	(18.395.488.116,00)	(31,50)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	93.499.574.000,00	87.599.059.000,00	(5.900.515.000,00)	(6,31)
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.363.195.241.034,00	1.314.871.660.754,47	(48.323.580.279,53)	(3,54)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	670.077.597.790,00	722.648.005.038,47	52.570.407.248,47	7,85
2.1.1	Belanja Pegawai	506.367.719.356,00	494.258.260.486,47	(12.109.458.869,53)	(2,39)
2.1.4	Belanja Hibah	32.755.781.613,00	39.331.123.067,00	6.575.341.454,00	20,07
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.002.194.000,00	7.062.194.000,00	(2.940.000.000,00)	(29,39)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	118.951.902.821,00	109.739.419.721,00	(9.212.483.100,00)	(7,74)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	72.257.007.764,00	70.257.007.764,00	3.512,85
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	693.117.643.244,00	592.223.655.716,00	(100.893.987.528,00)	(14,56)
2.2.1	Belanja Pegawai	117.647.307.480,00	121.227.236.542,00	3.579.929.062,00	3,04
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.428.227.622,00	279.882.454.956,55	(34.545.772.665,45)	(10,99)
2.2.3	Belanja Modal	261.042.108.142,00	191.113.964.217,45	(69.928.143.924,55)	(26,79)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(43.004.859.189,00)	(204.170.204.134,47)	(161.165.344.945,47)	374,76
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	45.004.859.189,00	206.170.204.134,47	161.165.344.945,47	358,11
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.004.859.189,00	206.170.204.134,47	161.165.344.945,47	358,11
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	43.004.859.189,00	204.170.204.134,47	161.165.344.945,47	374,76
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA								
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	Rp	%			
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14	
1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	170.927.501.494,00	112.545.866.000,00	283.473.367.494,00	171.768.335.916,00	116.591.100.000,00	288.359.435.916,00	4.886.068.422,00	1,72	
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	170.927.501.494,00	112.545.866.000,00	283.473.367.494,00	171.768.335.916,00	116.591.100.000,00	288.359.435.916,00	4.886.068.422,00	1,72	
1.02.01	Dinas Kesehatan	17.295.714.800,00	23.295.714.800,00	6.000.000.000,00	34,69	70.591.184.060,00	117.286.891.000,00	187.878.075.060,00	71.464.927.422,50	134.581.332.000,00	206.046.259.422,50	18.168.184.362,50	9,67	
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	17.295.714.800,00	23.295.714.800,00	6.000.000.000,00	34,69	70.591.184.060,00	117.286.891.000,00	187.878.075.060,00	71.464.927.422,50	134.581.332.000,00	206.046.259.422,50	18.168.184.362,50	9,67	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,00)	7.716.324.870,00	92.865.915.000,00	100.582.239.870,00	7.453.184.650,00	43.020.994.000,00	50.474.178.650,00	(50.108.061.220,00)	(49,82)	
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,00)	7.716.324.870,00	92.865.915.000,00	100.582.239.870,00	7.453.184.650,00	43.020.994.000,00	50.474.178.650,00	(50.108.061.220,00)	(49,82)	
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.130.590,00	94.161.901.000,00	98.218.031.590,00	3.953.285.550,00	61.719.362.000,00	65.672.647.550,00	(32.545.384.040,00)	(33,14)	
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.130.590,00	94.161.901.000,00	98.218.031.590,00	3.953.285.550,00	61.719.362.000,00	65.672.647.550,00	(32.545.384.040,00)	(33,14)	
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.922.200,00	2.863.200.000,00	6.901.122.200,00	3.925.097.050,00	2.275.233.000,00	6.200.330.050,00	(700.792.150,00)	(10,15)	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Keterbiban	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.922.200,00	2.863.200.000,00	6.901.122.200,00	3.925.097.050,00	2.275.233.000,00	6.200.330.050,00	(700.792.150,00)	(10,15)	
1.05.02	Satuan Palang Merah Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323.247.720,00	4.476.947.000,00	21.800.194.720,00	16.637.251.400,00	4.448.625.000,00	21.085.876.400,00	(714.318.320,00)	(3,28)	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Keterbiban	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323.247.720,00	4.476.947.000,00	21.800.194.720,00	16.637.251.400,00	4.448.625.000,00	21.085.876.400,00	(714.318.320,00)	(3,28)	
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001.772.290,00	2.092.000.000,00	9.093.772.290,00	6.704.913.162,00	2.257.856.000,00	8.962.769.162,00	(131.003.128,00)	(1,44)	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Keterbiban	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001.772.290,00	2.092.000.000,00	9.093.772.290,00	6.704.913.162,00	2.257.856.000,00	8.962.769.162,00	(131.003.128,00)	(1,44)	
1.06.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.115.052,00	6.356.744.000,00	10.066.859.052,00	3.566.625.844,00	4.692.197.000,00	8.258.822.844,00	(1.808.036.208,00)	(17,96)	
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.115.052,00	6.356.744.000,00	10.066.859.052,00	3.566.625.844,00	4.692.197.000,00	8.258.822.844,00	(1.808.036.208,00)	(17,96)	
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.684.280,00	2.576.960.000,00	5.658.644.280,00	3.091.399.540,00	2.346.539.000,00	5.437.938.540,00	(220.705.740,00)	(3,90)	
2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.684.280,00	2.576.960.000,00	5.658.644.280,00	3.091.399.540,00	2.346.539.000,00	5.437.938.540,00	(220.705.740,00)	(3,90)	
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.671.730,00	5.519.466.000,00	9.938.137.730,00	4.256.019.390,00	4.330.196.000,00	8.586.215.390,00	(1.351.922.380,00)	(13,60)	
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.671.730,00	2.004.575.000,00	6.423.246.730,00	4.256.019.390,00	1.182.583.440,00	5.438.602.790,00	(984.643.940,00)	(15,33)	
2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.891.000,00	3.514.891.000,00	0,00	3.147.612.560,00	3.147.612.560,00	(367.278.440,00)	(10,45)	
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.804.852,00	5.944.447.000,00	15.933.251.852,00	9.293.607.702,00	4.474.943.000,00	13.768.550.702,00	(2.164.701.150,00)	(13,59)	
2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.804.852,00	2.438.123.000,00	12.426.927.852,00	9.293.607.702,00	1.642.806.350,00	10.936.414.052,00	(1.490.513.800,00)	(11,99)	
3.03	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.324.000,00	3.506.324.000,00	0,00	2.832.136.650,00	2.832.136.650,00	(674.187.350,00)	(19,23)	
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092.844.580,00	2.682.365.000,00	8.775.209.580,00	5.861.048.100,00	1.493.314.000,00	7.354.362.100,00	(1.420.847.480,00)	(16,19)	
2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092.844.580,00	2.682.365.000,00	8.775.209.580,00	5.861.048.100,00	1.493.314.000,00	7.354.362.100,00	(1.420.847.480,00)	(16,19)	
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.882.268,00	3.213.175.000,00	8.857.057.268,00	5.389.419.248,00	2.855.792.000,00	8.245.211.248,00	(611.846.020,00)	(6,91)	
2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.882.268,00	3.213.175.000,00	8.857.057.268,00	5.389.419.248,00	2.855.792.000,00	8.245.211.248,00	(611.846.020,00)	(6,91)	
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.711.530,00	3.086.000.000,00	7.295.711.530,00	4.035.759.050,00	1.698.951.000,00	5.734.710.050,00	(1.561.001.480,00)	(21,40)	
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.711.530,00	3.086.000.000,00	7.295.711.530,00	4.035.759.050,00	1.698.951.000,00	5.734.710.050,00	(1.561.001.480,00)	(21,40)	
2.09.01	Dinas Perhubungan	6.245.000.000,00	3.133.000.000,00	(3.112.000.000,00)	(49,83)	5.695.871.428,00	7.554.200.000,00	13.250.071.428,00	5.496.064.668,00	5.940.563.000,00	11.436.627.668,00	(1.813.443.760,00)	(13,69)	
2.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	6.245.000.000,00	3.133.000.000,00	(3.112.000.000,00)	(49,83)	5.695.871.428,00	7.554.200.000,00	13.250.071.428,00	5.496.064.668,00	5.940.563.000,00	11.436.627.668,00	(1.813.443.760,00)	(13,69)	
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.445.640,00	9.608.000.000,00	14.483.445.640,00	4.998.004.561,00	9.273.171.876,00	14.271.176.437,00	(212.269.203,00)	(1,47)	
2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.445.640,00	9.483.000.000,00	14.358.445.640,00	4.998.004.561,00	9.215.471.876,00	14.213.476.437,00	(144.969.203,00)	(1,01)	
2.14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	42.700.000,00	42.700.000,00	(32.300.000,00)	(43,07)	
2.15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	





KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp	Rp	Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.01	4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	38.775.000,00	38.775.000,00	(121.225.000,00)	(75,77)
	4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232.100.985,00	3.252.000.000,00	12.484.100.985,00	8.247.702.272,00	2.476.725.000,00	10.724.427.272,00	(1.769.673.713,00)	(14,16)
4.03.01	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351.170.490,00	14.406.371.800,00	21.757.542.290,00	6.649.941.138,00	10.683.901.740,00	17.333.842.878,00	(4.423.699.412,00)	(20,33)
	4.03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351.170.490,00	11.571.371.800,00	18.922.542.290,00	6.649.941.138,00	6.765.611.240,00	13.415.552.378,00	(3.506.989.912,00)	(18,53)
	4.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000.000,00	2.835.000.000,00	0,00	1.918.290.500,00	1.918.290.500,00	(916.709.500,00)	(32,34)
4.04.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.040.456.858.147,00	959.862.481.297,00	(80.594.376.850,00)	(7,75)	186.878.301.814,00	24.486.400.000,00	211.364.701.814,00	253.636.635.252,00	27.459.468.000,00	281.096.103.252,00	69.731.401.438,00	32,99
	4.04	1.040.456.858.147,00	959.862.481.297,00	(80.594.376.850,00)	(7,75)	186.878.301.814,00	24.486.400.000,00	211.364.701.814,00	253.636.635.252,00	27.459.468.000,00	281.096.103.252,00	69.731.401.438,00	32,99
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	251.470.408.898,00	118.480.260.523,00	(132.990.148.375,00)	(52,89)	17.575.792.333,00	6.289.200.000,00	23.864.992.333,00	12.413.142.444,00	4.129.241.000,00	16.542.383.444,00	(7.322.608.889,00)	(30,68)
	4.04	251.470.408.898,00	118.480.260.523,00	(132.990.148.375,00)	(52,89)	17.575.792.333,00	6.289.200.000,00	23.864.992.333,00	12.413.142.444,00	4.129.241.000,00	16.542.383.444,00	(7.322.608.889,00)	(30,68)
4.05.06	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054.482.060,00	6.379.884.000,00	17.434.366.060,00	9.272.807.693,97	4.803.159.000,00	14.075.966.693,97	(3.358.399.366,03)	(19,26)
	4.05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054.482.060,00	6.379.884.000,00	17.434.366.060,00	9.272.807.693,97	4.803.159.000,00	14.075.966.693,97	(3.358.399.366,03)	(19,26)
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.320.190.381.845,00</b>	<b>1.110.701.456.620,00</b>	<b>(209.488.925.225,00)</b>	<b>(15,87)</b>	<b>670.077.597.790,00</b>	<b>693.117.643.244,00</b>	<b>1.363.195.241.034,00</b>	<b>722.648.005.038,47</b>	<b>592.223.655.716,00</b>	<b>1.314.871.660.754,47</b>	<b>(48.323.580.279,53)</b>	<b>(3,54)</b>

